

E-ISSN 2964-1764 (Online)  
**ESENSI DARUNA : JURNAL KOMUNIKASI**  
Vol 5 Issue 1, Mei 2026  
<https://esensijournal.com/index.php/daruna/index>  
[doi.org/10.56943/daruna.v5i1](https://doi.org/10.56943/daruna.v5i1)

*tvOne's Framing of the Government's Efforts to Address the  
Natural Disaster in Sumatra on the  
Apa Kabar Indonesia Pagi*

**Maasyithah Hutagalung**<sup>1\*</sup>  
<sup>1</sup>Institut Bisnis Nusantara  
<sup>1</sup>[sitahutagalung@gmail.com](mailto:sitahutagalung@gmail.com)

\*Corresponding Author: Maasyithah Hutagalung  
Email: [sitahutagalung@gmail.com](mailto:sitahutagalung@gmail.com)

## ABSTRACT

*This research aims to determine the framing of tvOne on the Apa Kabar Indonesia Pagi program regarding the government's efforts in overcoming natural disasters in Sumatra in the news "Sumatra is the Most Affected Area in 2025 Natural Disasters". This research method is qualitative with Zhongdang Pan & Gerald M. Kosicki framing analysis. The object of this research is the Apa Kabar Indonesia Pagi program on tvOne in five news about Sumatra which is the most affected area in 2025 natural disasters on December 6, 8, 14, 17, and 30, 2025. The conclusion of the study found that tvOne on the Apa Kabar Indonesia Pagi program news "Sumatra is the Most Affected Area in 2025 Natural Disasters" directs messages to the public that tend to highlight the duties and functions of the government that have not been fully responsible for disaster management. However, the news still does not emphasize the aspects of advanced management, mitigation aspects, and disaster prevention in depth. This shows that the media is more constructing reality regarding emergency conditions and government responses than long-term efforts in disaster risk reduction. Thus, the news shows that disaster management has not been fully optimal as mandated in Law Number 24 of 2007, Presidential Regulation of the Republic of Indonesia Number 75 of 2021, and Regulation of the National Disaster Management Agency of the Republic of Indonesia Number 1 of 2026, so that it is necessary to increase mitigation efforts, preparedness, and more effective coordination in facing disasters in the future.*

**Keywords:** *Framing, News, Government Efforts, Disaster Management*

## **Framing tvOne Mengenai Upaya Pemerintah dalam Menanggulangi Bencana Alam Sumatera pada Program Apa Kabar Indonesia Pagi**

### **ABSTRAK**

*Penelitian ini bertujuan mengetahui framing tvOne pada program Apa Kabar Indonesia Pagi mengenai upaya pemerintah dalam menanggulangi bencana alam di Sumatera pada berita “Sumatera jadi Daerah paling Terdampak Bencana Alam 2025”. Metode penelitian ini adalah kualitatif dengan analisis framing Zhongdang Pan & Gerald M. Kosicki. Objek penelitian ini adalah program Apa Kabar Indonesia Pagi tvOne pada lima berita mengenai Sumatera yang menjadi daerah paling terdampak bencana alam 2025 tanggal 6, 8, 14, 17, dan 30 Desember 2025. Kesimpulan penelitian menemukan bahwa tvOne pada Program Apa kabar Indonesia Pagi berita “Sumatera jadi Daerah paling Terdampak Bencana Alam 2025” mengarahkan pesan kepada publik yang cenderung menonjolkan tugas dan fungsi pemerintah yang belum sepenuhnya bertanggung jawab dalam penanggulangan bencana. Namun pemberitaan masih kurang menekankan pada aspek penanggulangan lanjut, aspek mitigasi, dan pencegahan bencana secara mendalam. Hal ini menunjukkan bahwa media lebih banyak membangun konstruksi realitas mengenai kondisi darurat dan respon pemerintah dibandingkan upaya jangka panjang dalam pengurangan risiko bencana. Dengan demikian, pemberitaan tersebut memperlihatkan bahwa penanggulangan bencana belum sepenuhnya optimal sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2021, dan Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026, sehingga diperlukan peningkatan upaya mitigasi, kesiapsiagaan, serta koordinasi yang lebih efektif dalam menghadapi bencana di masa mendatang.*

**Kata Kunci:** *Pembingkaihan, Berita, Upaya Pemerintah, Penanggulangan Bencana*

### **PENDAHULUAN**

Letak Indonesia yang berada di kawasan *Ring of Fire* atau cincin api Pasifik menyebabkan wilayah ini memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap berbagai bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, banjir, dan tanah longsor. Pulau Sumatera merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang sering mengalami bencana alam. Karakteristik geografis berupa pegunungan, daerah aliran sungai yang luas, curah hujan tinggi, dan adanya jalur patahan aktif meningkatkan potensi terjadinya gempa bumi, banjir dan tanah longsor, salah satunya bencana banjir dan tanah longsor Sumatera pada 25 - 30 November 2025. Menurut data statistik yang dihimpun oleh BNPB dalam kompas.com menjelaskan bahwa hingga 23 Desember 2025, total korban jiwa akibat bencana tersebut mencapai 1.112 orang. Bencana ini melanda 52 kabupaten/kota di tiga provinsi utama, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Rinciannya, di Provinsi Aceh tercatat 483 orang meninggal dunia, 32 orang hilang, dan sekitar 4.300 orang luka-luka. Di Sumatera Utara, korban meninggal mencapai 369

orang, dengan 72 orang hilang dan sekitar 2.300 orang luka-luka. Sementara di Sumatera Barat, 260 orang dilaporkan meninggal dunia, 72 orang hilang, dan sekitar 382 orang luka-luka. Selain korban jiwa, bencana ini juga menyebabkan sekitar 498.447 jiwa mengungsi, dengan konsentrasi terbesar berada di Aceh, yang mencatat lebih dari 473 ribu pengungsi. Dari sisi kerusakan, sedikitnya 158.088 rumah warga rusak, serta sekitar 1.600 fasilitas umum. termasuk sekolah, rumah ibadah, dan jembatan mengalami kerusakan berat.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa bencana alam tidak hanya menimbulkan kerusakan lingkungan dan infrastruktur, tetapi juga berdampak luas terhadap kehidupan masyarakat yang kehilangan tempat tinggal, mata pencaharian, dan mengalami trauma. Kerugian ekonomi juga cukup besar akibat kerusakan permukiman, fasilitas umum, dan sarana transportasi.

Fenomena bencana alam dapat terjadi secara tiba-tiba maupun bertahap, seperti banjir akibat curah hujan tinggi atau tanah longsor akibat kondisi tanah yang labil. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dalam peraturan.bpk.go.id: “Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.”

Berdasarkan pernyataan tersebut, bencana alam dapat dipahami sebagai peristiwa yang berpotensi mengganggu kehidupan masyarakat dan menimbulkan kerugian secara fisik, sosial, dan ekonomi. Bencana alam menimbulkan dampak kemanusiaan yang besar sebagaimana menurut BNPB dalam kompas.com hingga pertengahan Desember, tercatat 1.498 orang meninggal dunia, 264 orang hilang, dan 7.751 orang mengalami luka-luka. Selain korban jiwa, 10.275.745 orang tercatat menderita dan mengungsi, menjadikan bencana sebagai persoalan sosial dan kemanusiaan yang sangat luas, terutama di wilayah dengan kepadatan penduduk tinggi. Tercatat 184.344 unit rumah mengalami kerusakan, terdiri dari 49.294 rumah rusak berat, 37.524 rusak sedang, dan 97.526 rusak ringan. Sementara itu, 2.271 fasilitas umum dilaporkan rusak, meliputi 1.334 satuan pendidikan, 668 rumah ibadah, serta 269 fasilitas layanan kesehatan. Kerusakan juga terjadi pada 333 kantor pemerintahan dan 415 jembatan, yang berdampak langsung pada layanan publik dan konektivitas antar wilayah.

Dampak bencana terlihat dari jumlah korban jiwa, kerusakan infrastruktur, dan timbulnya berbagai permasalahan kondisi sosial masyarakat. Banyak korban harus tinggal di pengungsian dengan keterbatasan fasilitas, seperti air bersih, listrik, dan layanan kesehatan. Kondisi ini juga memengaruhi kesehatan mental, terutama pada anak-anak dan perempuan yang mengalami trauma akibat kehilangan tempat tinggal maupun anggota keluarga.

Hal ini menunjukkan bahwa bencana alam perlu ditanggulangi secara serius oleh pemerintah karena menimbulkan dampak luas bagi masyarakat. Upaya penanggulangan mencakup pencegahan, penanganan saat bencana, dan pemulihan

pascabencana. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana juga menegaskan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab dalam melakukan upaya pencegahan, penanganan, dan pemulihan guna melindungi masyarakat dari dampak bencana. Lebih lanjut, aspek pendanaan dalam penanggulangan bencana diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2021 tentang Dana Bersama Penanggulangan Bencana. Selain itu, terdapat mekanisme penguatan teknis pelaksanaan penanggulangan bencana yang diatur dalam Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pelaksanaan Penelaahan, Verifikasi, dan Evaluasi terhadap Penyaluran Dana Bersama Penanggulangan Bencana.

Media massa memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi terkait bencana. Media tidak hanya memberitakan peristiwa, tetapi juga memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai mitigasi dan penanganan bencana. Melalui pemberitaan, masyarakat dapat mengetahui kondisi di lapangan, langkah pemerintah, dan bantuan yang diberikan kepada korban.

Salah satu media televisi yang aktif memberitakan bencana alam adalah tvOne melalui beberapa programnya, seperti Apa Kabar Indonesia Pagi. Program ini menyoroti bencana alam yang melanda wilayah Sumatera dalam beberapa episode, seperti pada 6, 8, 14, 17, dan 30 Desember 2025. Pemberitaan tersebut memuat kondisi korban, proses evakuasi, dan upaya pemerintah dalam menangani situasi darurat, serta menghadirkan narasumber seperti pejabat pemerintah, relawan, dan pakar untuk memberikan perspektif terkait penanganan bencana.

Berita pertama tayang 6 Desember 2025 dengan judul “Bangkit Dari Trauma Banjir Dan Longsor.” Pemberitaan ini menjelaskan banjir bandang dan tanah longsor di wilayah Tapanuli Selatan, Sumatera Utara menyebabkan banyak warga kehilangan tempat tinggal dan harus mengungsi. 1.365 pengungsi masih di posko pengungsian lebih dari 11 hari dengan keterbatasan fasilitas listrik, air bersih, dan pangan. Meski bantuan logistik mulai berdatangan, para pengungsi kesulitan memenuhi kebutuhan dasar dan mengalami tekanan psikologis akibat kehilangan harta benda. Terdapat korban meninggal dunia dan ratusan kepala keluarga kehilangan rumah, menunjukkan pentingnya percepatan pemulihan pascabencana, baik secara fisik maupun mental. Berita kedua pada 8 Desember 2025 dengan judul “Sekolah Darurat Untuk Siswa Korban Banjir” menyoroti upaya pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan dalam menyediakan sekolah darurat bagi siswa terdampak banjir bandang. Fasilitas seperti balai desa dan kantor kecamatan digunakan sebagai tempat belajar sementara karena banyak bangunan sekolah rusak parah akibat bencana. Puluhan sekolah rusak, kegiatan belajar mengajar terganggu, sehingga langkah penyediaan sekolah darurat menjadi solusi agar proses pendidikan tetap berjalan, khususnya menjelang ujian semester.

Berita ketiga pada 14 Desember 2025 dengan judul “Prabowo Pastikan Percepatan Penanganan Bencana” menjelaskan kunjungan Presiden ke sejumlah wilayah terdampak bencana di Sumatera untuk meninjau langsung kondisi

pengungsi dan penanganan di lapangan. Presiden, TNI, Polri, dan instansi terkait memastikan pemenuhan kebutuhan dasar seperti air bersih, listrik, dan logistik bagi para korban. Meskipun terdapat kendala infrastruktur akibat kondisi alam, pemerintah menegaskan komitmennya untuk mempercepat proses pemulihan secara bertahap. Berita keempat pada 17 Desember 2025 dengan judul “Bencana Sumatera: Pemerintah Siapkan 2000 Rumah” menegaskan langkah pemerintah dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana dengan merencanakan pembangunan hunian sementara dan hunian tetap bagi masyarakat terdampak. Juga akan membentuk satuan tugas khusus untuk mempercepat penanganan dan memastikan seluruh pihak bekerja secara optimal di lapangan, ditegaskan bahwa penanganan bencana dilakukan secara terkoordinasi tanpa menjadikannya sebagai ajang simbolis, melainkan berfokus pada penyelesaian masalah masyarakat.

Berita kelima pada 30 Desember 2025 dengan judul “Bencana Banjir dan Longsor di Sumatera; Sumatera Jadi Daerah Paling Terdampak Bencana Alam 2025” membahas bahwa sepanjang tahun 2025 wilayah Sumatera menjadi salah satu daerah paling terdampak bencana akibat curah hujan tinggi, cuaca ekstrem, dan kondisi geografis. Bencana menyebabkan korban jiwa, kerusakan infrastruktur, dan terganggunya aktivitas masyarakat. Pemerintah melakukan penanganan melalui koordinasi lintas lembaga, penyaluran bantuan logistik, layanan kesehatan, serta dukungan psikososial. Selain itu, upaya pemulihan tidak hanya difokuskan pada tanggap darurat, tetapi juga pada rehabilitasi, rekonstruksi, serta penguatan mitigasi bencana ke depan.

Pemberitaan mengenai penanganan bencana alam di Sumatera menarik untuk dibahas karena bila penanganan bencana tidak dilakukan dengan baik, maka akan semakin banyak korban termasuk anak-anak sebagai generasi penerus bangsa yang terhambat masa depannya karena mereka akan kehilangan kesempatan untuk memiliki kehidupan yang lebih baik. Dampak tersebut tidak hanya dirasakan dalam aspek sosial dan ekonomi, tetapi juga berpengaruh pada sektor pendidikan, hingga ke tingkat sekolah dasar (SD). Akibatnya, proses belajar terganggu dan perkembangan anak menjadi terhambat, sehingga ke depannya bangsa Indonesia berpotensi tidak dapat maju secara optimal karena generasi penerus bangsa turut terdampak.

Pemberitaan mengenai upaya penanganan bencana alam tidak terlepas dari sudut pandang atau *framing* yang digunakan oleh media. Cara media menyusun informasi, memilih narasumber, dan menekankan aspek tertentu dapat memengaruhi pemahaman masyarakat terhadap peristiwa yang diberitakan.

Penjelasan-penjelasan tersebut menunjukkan tvOne melalui program Apa kabar Indonesia Pagi pada berita mengenai upaya pemerintah dalam menanggulangi bencana Sumatera terlihat mengarahkan pesan tertentu atau *framing* kepada masyarakat atau khalayak. Namun perlu dilakukan analisis lebih lanjut mengenai pengarah pesan atau *framing* tersebut dalam penelitian dengan judul *Framing tvOne Mengenai Upaya Pemerintah dalam Menanggulangi*

Bencana Alam Sumatera pada Program Apa Kabar Indonesia Pagi. Penelitian ini fokus pada *framing* tvOne di program Apa Kabar Indonesia Pagi mengenai upaya pemerintah dalam menanggulangi bencana alam yang seharusnya tidak hanya dilakukan saat bencana telah terjadi atau pasca bencana, namun bencana alam dapat dideteksi dan harus dilaksanakan penanganannya bahkan sebelum terjadi melalui mitigasi dan mekanisme prabencana. Upaya penanggulangan bencana mencakup berbagai tahapan yang saling berkaitan, mulai dari pencegahan hingga pemulihan pascabencana, termasuk mekanisme teknis dan pendanaannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2021 tentang Dana Bersama Penanggulangan Bencana, dan Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pelaksanaan Penelaahan, Verifikasi, dan Evaluasi terhadap Penyaluran Dana Bersama Penanggulangan Bencana

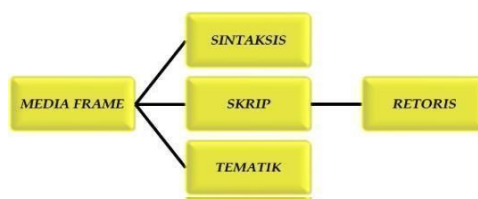
Penelitian menggunakan analisis *framing* telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya, salah satunya penelitian yang dilakukan oleh Sucipta dan Kurniawan (2021) dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa secara struktur media *online* Detik.com lebih menekankan kepada peran pemerintah melalui berita diterbitkan yang cenderung mengarah kepada membangun opini positif terhadap khalayak. Sedangkan kompas.com lebih berfokus kepada pemberitaan yang bersikap netral dan pemberitaan baik dari sudut pandang pemerintah ataupun dari sisi masyarakat. Berikutnya penelitian terdahulu oleh Insani dan Zamzamy (2023) dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa analisis *framing* yang dilakukan CNBCIndonesia.com dan Kompas.com terdapat perbedaan dalam memberitakan dampak lingkungan pemindahan ibu kota negara. CNBCIndonesia.com lebih berfokus pada lingkup wilayah Ibu Kota Negara di Kalimantan terdapat bencana alam yang terjadi setiap tahun dan bagaimana pemerintah menyikapi hal ini. Sedangkan Kompas.com lebih fokus pada upaya pemerintah dalam meminimalisir dampak lingkungan yang terjadi akibat pembangunan Ibu Kota Nusantara.

Selanjutnya penelitian terdahulu oleh Paramita, Kartinawati, dan Wiryawan (2022) dengan hasil penelitian menunjukkan pemberitaan yang dipublikasikan CNN Indonesia.com pada peristiwa yang ada saat penutupan Thomas Cup 2020 lebih berfokus kepada menyeleksi orang-orang yang berkompeten pada peristiwa tersebut seperti atlet, kemenpora sehingga pemberitaan CNN Indonesia.com terlihat lebih objektif dan netral. Sedangkan Pikiran Rakyat.com tidak intens dalam memberitakan upacara penutupan Thomas Cup 2020 dengan pemilihan informan cenderung lebih luas dalam memberikan tanggapan. Kemudian penelitian terdahulu oleh Marheinis dan Herpindo (2021) dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberitaan Indosport.com mengenai kekalahan Timnas Indonesia lebih berfokus kepada penyebab kekalahan.. Sedangkan Bolasport.com lebih berfokus kepada respon pelatih terhadap kekalahan Timnas.

Penelitian lainnya mengenai *framing* unggahan informasi bencana banjir dan longsor Sumatera di akun Instagram @kompas.com. Hasil penelitian menjelaskan aplikasi *online* berupa akun Instagram @kompas.com membingkai bencana sebagai krisis kemanusiaan berskala besar yang ditampilkan melalui visual, angka korban, dan narasi emosional. Rekomendasi penanganan

ditampilkan secara implisit melalui evakuasi dan ajakan bantuan. *Framing* yang digunakan memperkuat kesan darurat dan meningkatkan kesadaran publik terhadap bencana (Fadillah, Azhar, 2026). Relevansi dengan penelitian ini yaitu menggunakan model *framing* yang serupa yaitu analisis *framing* Zhongdang Pan dan Kosicki dengan mendeskripsikan yang ditonjolkan dari masing-masing media menggunakan struktur sintaksis, skrip, tematik, dan retorik. Namun kebaruan pada penelitian ini adalah pengarahannya ditekankan pada upaya dan tanggung jawab pemerintah yang seharusnya telah dilakukan saat bencana belum terjadi atau prabencana, pemulihan pasca bencana, dan anggaran negara yang sebenarnya telah ada untuk penanggulangan bencana mulai dari pencegahan hingga pemulihan pascabencana.

*Framing* Zhongdang Pan & Gerald M Kosicki dapat didefinisikan bahwa „*framing* sebagai strategi komunikasi dalam memproses berita. Perangkat Kognisi yang digunakan dalam mengkode informasi, menafsirkan peristiwa, dihubungkan dengan rutinitas konvensi pembentukan cerita (Maulana, Putri, 2024). Dapat diketahui kecenderungan wartawan dalam memahami sebuah peristiwa dan bagaimana seorang wartawan menyusun peristiwa tersebut ke dalam bentuk berita dengan pemilihan kalimat sehingga meyakinkan pembaca bahwa berita yang ditulis tersebut adalah kebenaran. Perangkat *framing* ini terdiri dari empat konsep, sintaksis atau cara wartawan menyusun fakta, *skrip* atau cara wartawan mengisahkan fakta, tematik atau cara wartawan menulis fakta, retorik atau cara wartawan menekankan fakta.



**Gambar.2.** Analisis framing Zhongdang Pan & Gerald M. Kosicki

Sumber: Data Penelitian (2025)

Masalah penelitian tertuang dalam pertanyaan: “Bagaimana *framing* tvOne mengenai upaya pemerintah dalam menanggulangi bencana alam Sumatera pada program Apa Kabar Indonesia Pagi? Tujuan penelitian ini adalah mengetahui *framing* tvOne mengenai upaya pemerintah dalam menanggulangi bencana alam Sumatera pada program Apa Kabar Indonesia Pagi

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang menekankan realitas itu berdimensi interaktif, jamak dan suatu pertukaran pengalaman sosial yang diinterpretasikan oleh individu-individu. Penelitian kualitatif ditujukan untuk memahami fenomena-fenomena sosial dari sudut pandang atau perspektif subyek/partisipan. Penelitian kualitatif menggunakan latar ilmiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada, (Anggito, Setiawan, 2018). Dua jenis sumber data:

1. Data Primer

Data primer dari penelitian ini adalah transkrip berita yang berasal dari pengumpulan berita-berita mengenai upaya pemerintah dalam menanggulangi bencana alam Sumatera pada program Apa Kabar Indonesia Pagi tanggal 6, 8, 14, 17, dan 30 Desember 2025

2. Data sekunder

Data sekunder pada penelitian ini untuk mendukung dan menjelaskan lebih dalam mengenai penelitian yang diperoleh dari buku-buku atau literatur studi pustaka, jurnal ilmiah, artikel-artikel, sumber berbasis internet  
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini:

3. Observasi

Observasi yaitu proses mengamati dan mencatat secara sistematis terhadap suatu objek atau fenomena yang diteliti. Teknik observasi memiliki ciri yaitu lebih spesifik dibandingkan dengan teknik wawancara dan kuesioner. Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis, (Sugiyono, 2014). Pengamatan yang dilakukan peneliti melihat langsung pada objek yaitu transkrip dari program Apa Kabar Indonesia Pagi 6, 8, 14, 17, dan 30 Desember 2025.

4. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu cara pengumpulan data yang berbentuk sebuah bukti foto, video, catatan, transkrip dan lain sebagainya. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dari penelitian kualitatif. Data dokumentasi pada penelitian ini berupa tayangan berita-berita mengenai upaya pemerintah dalam menanggulangi bencana alam Sumatera pada program Apa Kabar Indonesia Pagi tanggal 6, 8, 14, 17, dan 30 Desember 2025.

5. Studi Pustaka

Studi Pustaka merupakan teknik pengumpulan data yang berasal dari literatur, jurnal ilmiah dan studi kepustakaan lainnya yang berkaitan dengan hal yang diteliti. Studi Pustaka dalam hal ini menggunakan sumber-sumber dari berbagai buku, jurnal, literatur, jurnal ilmiah, artikel-artikel, sumber berbasis internet yang terkait dengan *content* penelitian

Penelitian ini menggunakan metode analisis *framing* Zhongdangpan dan Gerald M.Kosicki. “Analysis of Zhong Dang Pan and Gerald M. Kosicki 1993 in their writing „*Framing Analysis an Approach to News Discourse*’ divides into 4 structural dimensions of news text as a framing device, namely *syntax, script, thematic and rhetorical*. This model assumes that every news item has a frame that serves as the center of the organization of ideas. Frames are related to meaning. How someone interprets an event can be seen from the set of signs that appear in the text”, (Pratama, Saragih, 2022)

**Tabel 1.** Struktur Perangkat *Framing* Zhongdang Pan Dan Gerald M.Kosicki

<b>Struktur</b>	<b>Perangkat Framming</b>	<b>Unit Yang Diamati</b>
<b>SINTAKSIS</b> (Cara wartawan menyusun fakta)	- Skema Berita	Headline, lead, latar, informasi, kutipan, sumber, pernyataan, penutup
<b>SKRIP</b> (Cara wartawan mengisahkan fakta)	- Kelengkapan Berita	5W+1H (Who, What, When, Where, Why+How)
<b>TEMATIK</b> (Cara wartawan menuliskan fakta)	- Detail - Maksud - Nominalisasi - Koherensi - Bentuk Kalimat - Kata Ganti	Paragraf, proposisi, kalimat, hubungan antar kalimat
<b>RETORIS</b> (Cara wartawan menekankan fakta)	- Leksikon - Grafis - Metafora - Pengandaian	Kata, idiom, gambar, foto, grafik

Sumber: (Pratama, Saragih, 2022)

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Hasil penelitian menggunakan dokumentasi yang mengindikasikan media tvOne membingkai pesan pada program Apa Kabar Indonesia Pagi. Kemudian dokumentasi tersebut dianalisis menggunakan konsep *framing* dari Zhondang pan & Gerald M. Kosicki untuk meneliti berita-berita mengenai upaya pemerintah dalam menanggulangi bencana alam Sumatera pada program Apa Kabar Indonesia Pagi yang membuktikan bahwa adanya *framing* atau pemingkaian media yang dilakukan oleh Apa Kabar Indonesia Pagi tvOne mengenai upaya pemerintah dalam menanggulangi bencana alam di Sumatera. Data yang akan dianalisa merupakan pemberitaan tanggal 6, 8, 14, 17, dan 30

Desember 2025 yang diteliti dalam struktur sintaksis, skrip, tematik, dan retorik sebagai berikut;

**Tabel 2:** Hasil Analisis *Framing* Zhongdang Pan Dan Gerald M.Kosicki pada Berita “Bencana Banjir dan Longsor di Sumatera; Sumatera Jadi Daerah Paling Terdampak Bencana Alam 2025”

Struktur	Hasil yang diamati	Hasil
<b>Sintaksis</b>	<p><b>Headline:</b> Bencana Banjir dan Longsor di Sumatera; Sumatera Jadi Daerah Paling Terdampak Bencana Alam 2025</p> <p><b>Lead:</b> Tahun 2025 menjadi catatan penting bagi Indonesia, yang mana berbagai peristiwa besar seperti dinamika politik, isu sosial, hingga bencana alam terjadi silih berganti dan menyisakan duka mendalam. Sepanjang tahun 2025, wilayah Sumatera menjadi salah satu daerah yang paling terdampak bencana alam</p> <p><b>Latar Informasi:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tahun 2025 menjadi catatan penting bagi Indonesia, ditandai gejolak politik, isu sosial, bencana alam, seperti banjir di tiga provinsi, dan salah satu yang paling terdampak adalah Sumatera.</li> <li>- Beberapa wilayah Indonesia, dari ujung timur hingga barat terkena bencana alam.</li> <li>- Curah hujan tinggi, cuaca ekstrem, dan kondisi geografis memicu banjir besar dan tanah longsor di sejumlah provinsi</li> <li>- Ribuan orang dikabarkan tewas, ratusan ribu warga mengungsi, rumah rusak, fasilitas umum lumpuh, dan aktivitas ekonomi warga terganggu</li> <li>- Pemerintah berkordinasi dengan lintas Kementerian, lembaga dan tim evakuasi ke lokasi terdampak untuk membuka posko darurat yang menyalurkan bantuan logistik, kesehatan, dan psikososial bagi korban.</li> <li>- Pemerintah melakukan fase tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi wilayah terdampak.</li> <li>- Langkah mitigasi mulai diperkuat mulai dari pemetaan daerah rawan bencana hingga peningkatan sistem peringatan dini.</li> <li>- Namun sejak bulan November 2025, bencana terjadi di tiga provinsi dengan 1.140 korban meninggal dunia, dan 163 warga sampai saat ini masih hilang.</li> <li>- Bencan-bencana ini harus menjadi momentum memperkuat gotong royong, kerja sama.</li> <li>- Selanjutnya memastikan penanggulangan bencana tidak hanya pasca tetapi juga pencegahan melalui evaluasi regulasi</li> <li>- Bangsa Indonesia bergotong royong menanggulangi bencana.</li> </ul>	<p>Program berita Apa Kabar Indonesia Pagi dengan <i>headline</i> “Bencana Banjir dan Longsor di Sumatera; Sumatera Jadi Daerah Paling Terdampak Bencana Alam 2025” membahas kondisi bencana alam yang terjadi sepanjang tahun 2025 di wilayah Sumatera, dampak dan upaya penanganannya.</p> <p>Bagian <i>headline</i> terdapat penekanan pada posisi Sumatera sebagai wilayah yang paling terdampak bencana alam sehingga membangun fokus utama berita pada skala dampak dan urgensi penanganan bencana di wilayah tersebut, <i>Lead</i> menjelaskan bahwa 2025 menjadi catatan penting bagi Indonesia karena berbagai peristiwa besar terjadi termasuk bencana alam yang menyisakan duka mendalam sehingga <i>lead</i> berfungsi sebagai pengantar yang memberikan gambaran umum mengenai situasi nasional sekaligus mengarahkan fokus pada</p>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemerintah tidak perlu merasa tersaingi ketika masyarakat membantu, justru harus bergandengan termasuk dengan negara lain.</li> <li>- Negara punya kewajiban konstitusional melindungi rakyat, termasuk dari bencana.</li> <li>- Namun jika masih terjadi bencana karena ada izin pengelolaan hutan tanpa pengawasan, ini bentuk pengabaian konstitusi.</li> <li>- Pemimpin yang baik tidak membawa organisasinya ke dalam krisis, namun harus mencegah krisis, bukan hanya mengatasinya,</li> <li>- Bencana alam di Sumatera sepanjang 2025 bukan sekedar catatan musiman melainkan alarm keras tentang kesiapan negara menghadapi krisis</li> </ul> <p><b>Sumber:</b> Ketua Masyarakat kebijakan Publik Indonesia, Profesor Rian Nugroho</p> <p><b>Pernyataan:</b> Negara punya kewajiban konstitusional untuk melindungi rakyat, termasuk dari bencana. Kalau masih terjadi bencana karena ada izin pengelolaan hutan tanpa pengawasan, ini bentuk pengabaian terhadap konstitusi.</p> <p><b>Penutup:</b> Pemimpin yang baik tidak membawa organisasinya ke dalam krisis, namun harus mencegah krisis, bukan hanya mengatasinya. Bencana alam di Sumatera sepanjang 2025 bukan sekedar catatan musiman melainkan alarm keras.</p>	<p>wilayah Sumatera sebagai daerah terdampak. Latar informasi menjelaskan rinci penyebab dan dampak bencana, mulai dari faktor alam seperti curah hujan tinggi, cuaca ekstrem hingga kondisi geografis yang memicu banjir dan tanah longsor serta dampaknya seperti korban jiwa, pengungsian, rusaknya fasilitas dan terganggunya aktivitas ekonomi masyarakat. Sumber dalam berita ini adalah profesor Rian Nugroho yang memberikan opini terkait tanggung jawab negara dalam melindungi masyarakat dari bencana dan pentingnya evaluasi kebijakan dalam pengelolaan sumber daya sehingga menunjukkan adanya kombinasi antara informasi faktual dan analisis dari ahli. Bencana yang terjadi tidak hanya catatan tetapi peringatan bagi negara untuk meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi krisis dan menekankan pentingnya peran kepemimpinan dalam mencegah terjadinya krisis di masa depan, Struktur sintaksis berita ini disusun sistematis, dimulai dari</p>
--	---	--

		gambaran umum peristiwa, penjelasan dampak dan penyebab hingga upaya penanganan dan refleksi kritis yang memberikan pemahaman utuh mengenai kondisi bencana dan respons yang diperlukan.
<b>Skrip</b>	<p><b>Who:</b> Ketua Masyarakat Kebijakan Publik Indonesia, Profesor Rian Nugroho</p> <p><b>What:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemerintah tidak perlu merasa tersaingi ketika masyarakat dan negara lain bergotong royong menanggulangi banjir.</li> <li>- Negara punya kewajiban konstitusional untuk melindungi rakyat termasuk dari bencana. Namun bencana banyak terjadi di tahun 2025</li> <li>- Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang tidak membawa organisasinya ke dalam krisis.</li> </ul> <p><b>Where:</b> Studio The Convergence Indonesia, Jakarta</p> <p><b>When:</b> 30 Desember 2025</p> <p><b>Why:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemerintah tidak perlu merasa tersaingi ketika masyarakat dan negara lain bergotong royong menanggulangi banjir karena mereka memberi bantuan dengan semangat kebersamaan.</li> <li>- Negara punya kewajiban konstitusional untuk melindungi rakyat termasuk dari bencana. Namun bencana banyak terjadi di tahun 2025, salah satunya karena ada izin tanpa pengawasan yang merupakan bentuk pengabaian terhadap konstitusi</li> <li>- Pemimpin yang baik adalah yang melindungi rakyat termasuk dari bencana karena pemimpin hebat itu seharusnya mencegah krisis, bukan hanya mengatasinya</li> </ul> <p><b>How:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Curah hujan tinggi, cuaca ekstrem, dan kondisi geografis memicu banjir besar dan tanah longsor di sejumlah provinsi.</li> <li>- Pemerintah berkordinasi dengan lintas Kementerian, lembaga dan tim evakuasi ke lokasi terdampak untuk</li> </ul>	<p>Script dalam berita ini memuat pernyataan dari profesor Rian Nugroho, Ketua Masyarakat Kebijakan Publik Indonesia yang menjelaskan opini terkait penanggulangan bencana di Indonesia sepanjang tahun 2025 dengan <i>what</i>, <i>why</i>, dan <i>how</i> bahwa pemerintah tidak perlu merasa tersaingi ketika masyarakat dan negara lain bergotong royong dalam menanggulangi bencana karena hal ini merupakan bantuan dengan semangat kebersamaan, adanya izin pengelolaan hutan tanpa pengawasan merupakan bentuk pengabaian konstitusi, pemimpin yang baik dan hebat seharusnya mencegah krisis bukan hanya mengatasinya. Struktur <i>script</i> menunjukkan upaya penanggulangan bencana seharusnya tidak hanya berfokus pada respons setelah kejadian tetapi juga menekankan penting kolaborasi, tanggung</p>

	<p>membuka posko darurat.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemerintah menyalurkan bantuan logistik, layanan kesehatan, dan psikososial bagi korban.</li> <li>- Pemerintah melakukan fase tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi wilayah terdampak.</li> <li>- Langkah mitigasi mulai diperkuat mulai dari pemetaan daerah rawan bencana hingga peningkatan sistem peringatan dini.</li> </ul>	<p>jawab negara dan pencegahan melalui kebijakan serta kepemimpinan yang tepat yang memberikan gambaran menyeluruh mengenai upaya penanganan bencana di Indonesia.</p>
<p><b>Tematik</b></p>	<p><b>Paragraf</b>                  Menjelang akhir 2025, banyak pelajaran dari berbagai gejala, termasuk bencana banjir di tiga provinsi, Salah satu pelajaran yang dapat diambil adalah bangsa kita bergotong royong menanggulangi bencana. Pemerintah tidak perlu merasa tersaingi ketika masyarakat membantu.</p> <p><b>Proposisi</b>  <b>Dari:</b> berasal dari  <b>Ketika:</b> pada saat                  (Sumber : Kamus Besar Bahasa Indonesia)</p> <p>Menjelang akhir 2025, banyak pelajaran dari (berasal dari) berbagai gejala, termasuk bencana banjir di tiga provinsi, Salah satu pelajaran yang dapat diambil adalah bangsa kita bergotong royong menanggulangi bencana. Pemerintah tidak perlu merasa tersaingi ketika (pada saat) masyarakat membantu.</p> <p><b>Paragraf</b>                  Negara punya kewajiban konstitusional untuk melindungi rakyat, termasuk dari bencana. Kalau masih terjadi bencana karena ada izin pengelolaan hutan tanpa pengawasan, itu bentuk pengabaian terhadap konstitusi.</p> <p><b>Proposisi</b>  <b>Dari:</b> terhadap  <b>Karena:</b> sebab, lantaran  <b>Itu:</b> hal tersebut                  (Sumber : Kamus Besar Bahasa Indonesia)</p> <p><b>Makna</b>                  Negara punya kewajiban konstitusional untuk melindungi rakyat, termasuk dari (terhadap) bencana. Kalau masih terjadi bencana karena (sebab, lantaran) ada izin pengelolaan hutan tanpa pengawasan, itu (hal tersebut) bentuk pengabaian terhadap konstitusi.</p> <p><b>Paragraf</b>                  Pemimpin yang baik adalah yang tidak membawa</p>	<p>Peristiwa dalam berita menggunakan proposisi dari (berasal dari) yang menandakan sumber, asal pelajaran yang diperoleh dari berbagai gejala sepanjang 2025 termasuk bencana banjir di beberapa provinsi. Proposisi ‘ketika’ (pada saat) menunjukkan kondisi waktu yang menggambarkan keterlibatan masyarakat dalam membantu penanggulangan bencana. Paragraf selanjutnya digunakan proposisi ‘dari’ (terhadap), ‘karena’ (sebab, lantaran), ‘itu’ (hal tersebut) yang menunjukkan hubungan kewajiban negara dengan objek yang harus dilindungi, yaitu rakyat dari bencana, hubungan sebab akibat antara terjadinya bencana dengan adanya izin pengelolaan hutan tanpa pengawasan merupakan pengabaian terhadap konstitusi. Struktur tematik menunjukkan</p>

	<p>organisasinya ke dalam krisis karena pemimpin hebat itu seharusnya mencegah krisis bukan hanya mengatasinya</p> <p><b>Proposisi</b>  <b>Yang:</b> yakni  <b>Dalam:</b> di dalam  <b>Karena:</b> sebab, lantaran  <b>Itu:</b> hal tersebut          (Sumber : Kamus Besar Bahasa Indonesia)</p> <p><b>Makna</b>          Pemimpin yang baik adalah yang (yakni) tidak membawa organisasinya ke dalam (di dalam) krisis karena (sebab, lantaran) pemimpin hebat itu (tersebut)seharusnya mencegah krisis bukan hanya mengatasinya</p>	<p>hubungan yang sistematis antara sumber pembelajaran dari peristiwa bencana, keterlibatan Masyarakat, tanggung jawab negara hingga peran kepemimpinan dalam mencegah krisis yang membentuk alur makna yang saling berkaitan dalam upaya penanggulangan bencana</p>
<p><b>Retoris</b></p>	<p><b>Leksikon</b>  <b>Terdampak:</b> terkena akibat  <b>Lumpuh:</b> tidak dapat berfungsi  <b>Terganggu:</b> tidak lancar          (Sumber: Kamus Besar Bahasa Indonesia)</p> <p>Wilayah Sumatera menjadi daerah yang terdampak (terkena akibat) bencana alam. Ribuan orang dikabarkan tewas, ratusan ribu warga terpaksa mengungsi, rumah rusak, fasilitas umum lumpuh (tidak dapat berfungsi), dan aktivitas ekonomi warga terganggu (tidak lancar)</p> <p><b>Leksikon</b>  <b>Ke belakang:</b> masa lalu  <b>Pelajaran:</b> hal yang dipelajari, pengalaman  <b>Bergandengan:</b> bekerja sama, berpegangan          (Sumber: Kamus Besar Bahasa Indonesia)</p> <p>Kalau kita melihat ke belakang (masa lalu) menjelang akhir 2025, banyak pelajaran (hal yang dipelajari, pengalaman) dari berbagai gejala, termasuk bencana banjir di tiga provinsi. Pemerintah tidak perlu merasa tersaingi ketika masyarakat membantu, justru harus bergandengan (bekerja sama, berpegangan), termasuk dengan negara lain.</p> <p><b>Leksikon</b>  <b>Membawa:</b> menyebabkan, mengakibatkan <b>Mencegah:</b> menghalangi, menahan <b>Mengatasinya:</b> menanggulangi, menyelesaikan          (Sumber: Kamus Besar Bahasa Indonesia)</p> <p>Pemimpin yang baik adalah yang tidak membawa (menyebabkan, mengakibatkan) organisasinya ke</p>	<p>Penggunaan leksikon ‘terdampak’ (terkena akibat) menunjukkan bahwa wilayah Sumatera mengalami dampak langsung dari bencana alam sehingga menegaskan luasnya pengaruh bencana terhadap masyarakat, leksikon lumpuh (tidak dapat berfungsi) dan terganggu tidak lancar) menggambarkan kondisi kerusakan yang menyebabkan aktivitas sosial dan ekonomi tidak berjalan secara normal, leksikon ‘kebelakang’ (masa lalu) dan ‘pelajaran’ (hal yang dipelajari, pengalaman) menunjukkan bahwa peristiwa bencana tidak hanya dipahami sebagai kejadian tetapi juga sebagai refleksi yang dapat dijadikan evaluasi untuk perbaikan di masa depan, leksikon ‘bergandengan’ (bekerja sama, berpegangan) menegaskan pentingnya kerja sama dan</p>

	<p>dalam krisis. Jadi, kita harus ubah cara pandang pemimpin hebat itu yang mencegah (menghalangi, menahan) krisis, bukan hanya mengatasinya (menanggulangi, menyelesaikan)</p> <p><b>GAMBAR TAYANGAN BERITA “BENCANA BANJIR DAN LONGSOR DI SUMATRA”</b></p> 	<p>solidaritas pemerintah, masyarakat dan pihak lain dalam hadapi bencana. Pilihan leksikon dalam berita ini membangun makna bahwa bencana tidak hanya berdampak pada aspek fisik tetapi juga menjadi refleksi terhadap peran kepemimpinan, pentingnya evaluasi, dan kebutuhan akan kolaborasi dalam menghadapi dan mencegah krisis di masa depan.</p>
--	---	--

Sumber: Data Penelitian (2026)

Berdasarkan lima berita, struktur sintaksis dan skrip berita 1–5 menunjukkan bahwa tvOne dalam program Apa Kabar Indonesia Pagi membingkai peristiwa bencana sebagai realitas sosial yang mencakup kondisi darurat, upaya penanganan, dan proses pemulihan yang masih berlangsung. tvOne pada program Apa Kabar Indonesia Pagi berita “Sumatera Jadi Daerah Paling Terdampak Bencana Alam 2025” mengarahkan pesan kepada publik bahwa pemerintah belum melaksanakan tanggung jawabnya secara penuh dalam upaya menanggulangi bencana alam banjir dan tanah longsor di Sumatera.

Sebagai media massa, televisi tidak hanya menyampaikan informasi tetapi juga membentuk persepsi publik mengenai tingkat keparahan bencana, peran pemerintah, serta kebutuhan masyarakat terdampak dengan menonjolkan aspek tertentu sehingga membangun penilaian publik terhadap upaya dan kinerja pemerintah dalam penanggulangan bencana. Dengan demikian, struktur sintaksis dan skrip dalam kelima berita ini menunjukkan bahwa bencana tidak hanya dipahami sebagai peristiwa alam, tetapi juga sebagai isu sosial yang melibatkan upaya dan tanggung jawab pemerintah, masyarakat, dan sistem kebijakan dalam proses penanganannya sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2021 tentang Dana Bersama Penanggulangan Bencana, dan Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pelaksanaan Penelaahan, Verifikasi, dan Evaluasi terhadap Penyaluran Dana Bersama Penanggulangan Bencana

tvOne pada program Apa Kabar Indonesia Pagi berita “Sumatera Jadi Daerah Paling Terdampak Bencana Alam 2025” mengarahkan pesan kepada publik bahwa negara melalui pemerintah Republik Indonesia belum melaksanakan tanggung jawabnya secara penuh dalam upaya menanggulangi bencana banjir dan tanah longsor di Sumatera tahun 2025 sebagaimana Undang-Undang Nomor 24

Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Pasal 3 ayat (2) butir a, b, c, dan d serta Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2021 tentang Dana Bersama Penanggulangan Bencana Pasal 1 ayat (1): Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Pasal 3 ayat (2): prinsip-prinsip dalam penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat(1) adalah:

1. Cepat dan tepat;
2. Prioritas;
3. Koordinasi dan keterpaduan;
4. Berdaya guna dan berhasil guna.”

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2021 tentang Dana Bersama Penanggulangan Bencana Pasal 1 ayat (1) bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

Peraturan ini menunjukkan bahwa banjir dan tanah longsor di Sumatera merupakan bencana karena telah mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang ditandai dengan adanya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kehilangan harta benda, serta tekanan psikologis. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 3 ayat (2) menunjukkan bahwa pemerintah seharusnya melaksanakan upaya penanggulangan bencana secara cepat, tepat, prioritas, terpadu, berdaya guna, dan berhasil guna. Namun, realitas yang ditampilkan dalam pemberitaan menunjukkan kondisi yang belum optimal. Hal ini sebagaimana pernyataan sebanyak 1365 pengungsi banjir bandang Batang Toru di wilayah Tapanuli Selatan, Sumatera Utara sudah 11 hari di posko pengungsian Batuhula Batang Toru. Para pengungsi kesulitan mendapatkan air bersih, makanan, dan listrik yang masih minim dari pemerintah. Selain itu, salah satu relawan di pengungsian, Ibu Hera, menyatakan harapannya agar pemerintah segera membangun kembali tempat tinggal dan sekolah para pengungsi karena banyak rumah yang sudah hancur total. Dukungan moril sangat diperlukan karena bantuan fisik bukan satu-satunya yang dibutuhkan, tetapi juga bantuan psikologis. Pemulihan mental juga penting

Seharusnya pemerintah bertanggung jawab penuh dalam menanggulangi bencana di Sumatera dengan sejak awal memiliki program pembangunan nasional mengenai rencana pengurangan risiko bencana di daerah rawan, salah satunya wilayah Sumatera dengan kondisi geografis yang rentan terhadap bencana. Hal ini sebagaimana Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 6 huruf a: Tanggung jawab pemerintah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi pengurangan risiko bencana dan pemaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan.

Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 7 ayat (1) huruf b menyatakan: Pembuatan perencanaan pembangunan memasukkan unsur- unsur

penanggulangan bencana, Kemudian, Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 Pasal 1 ayat (1) menyatakan: Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.

Undang-undang dan peraturan-peraturan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah belum bertanggung jawab penuh dan belum memiliki perencanaan pembangunan yang optimal dalam pengurangan risiko bencana sejak awal, karena pemerintah baru berfokus pada penanganan setelah bencana terjadi, padahal sudah ada ketentuan-ketentuan yang mengatur upaya-upaya pencegahan bencana sedari awal. Hal ini diperkuat oleh pernyataan Presiden bahwa masih terdapat kendala di pengungsian, seperti masalah listrik akibat kondisi alam yang menyebabkan menara listrik rusak sehingga distribusi belum dapat berjalan maksimal.

Pemerintahan melalui Presiden terlihat belum melaksanakan tanggung jawabnya secara penuh dalam upaya menanggulangi bencana alam di Sumatera karena pemerintah seharusnya memiliki wewenang untuk menentukan kerja sama dalam penanggulangan bencana dengan negara lain sebagaimana Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 pasal 7 ayat (1) butir d: Penentuan kebijakan kerja sama dalam penanggulangan bencana dengan negara lain, badan-badan, atau pihak internasional lain.

Presiden tidak menerima penawaran dari negara lain yang ingin membantu penanganan penanggulangan bencana alam Sumatera sebagaimana pernyataan Presiden Prabowo di Jakarta pada 30 Desember 2025 bahwa banyak pimpinan negara lain ingin mengirim bantuan, tetapi Presiden menyatakan Indonesia masih mampu mengatasinya. Padahal hingga Februari 2026 penanganan bencana alam Sumatera masih terlihat lambat bahkan jumlah korban terus bertambah. Hal ini sebagaimana diberitakan: Dalam perkembangan terkini, terdapat penambahan meninggal dunia, sehingga total korban meninggal dunia tercatat sebanyak 1.204 jiwa, sementara itu korban hilang sebanyak 140 jiwa, sedangkan jumlah pengungsi sebanyak 105.842 jiwa.

Selain itu, dalam struktur sintaksis dan skrip juga dijelaskan bahwa upaya penanganan masih terus dilakukan, seperti percepatan pembangunan hunian sementara, pembukaan akses jalan dan jembatan, serta pemulihan kawasan permukiman yang melibatkan tim gabungan dari BNPB, pemerintah daerah, TNI, Polri, dan kementerian serta lembaga terkait lainnya. Bahkan, distribusi bantuan logistik telah mencapai 1.767,07 ton yang disalurkan melalui berbagai moda transportasi, meskipun pada waktu tertentu distribusi logistik tidak berjalan.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun berbagai upaya telah dilakukan, penanganan bencana belum sepenuhnya efektif dalam menekan dampak bencana dan jumlah korban yang terus bertambah. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah belum bertanggung jawab secara penuh dalam upaya menanggulangi bencana alam di Sumatera yang seharusnya dapat ditangani secara

cepat melalui kerja sama dan bantuan dari negara lain maupun badan internasional sebagaimana telah diatur dalam UU, namun Presiden tidak menerima bantuan tersebut.

Struktur tematik berita 1 sampai dengan berita 5 menunjukkan tvOne dalam program Apa Kabar Indonesia Pagi membangun tema yang menekankan hubungan sebab-akibat antara bencana, dampak yang ditimbulkan, serta respons pemerintah dalam proses penanganan. Tema yang dibangun melalui hubungan proposisi seperti “karena”, “akibat”, “dan”, serta “hingga” menunjukkan bahwa bencana tidak dipahami sebagai peristiwa alam semata, melainkan sebagai peristiwa sosial yang berkaitan dengan kesiapsiagaan, kebijakan, dan tanggung jawab pemerintah dalam upaya penanggulangnya. Struktur tematik yang dibangun media menunjukkan adanya keterkaitan antara kurang optimalnya kesiapsiagaan dengan besarnya dampak bencana yang ditimbulkan.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 33 menyatakan: “Penyelenggaraan penanggulangan bencana terdiri atas tahap prabencana, tanggap darurat, dan pascabencana.” Ketentuan ini menunjukkan bahwa tahap prabencana memiliki peran penting dalam mengurangi risiko bencana. Namun, struktur tematik pemberitaan menunjukkan bahwa dampak bencana masih sangat besar, sehingga menunjukkan bahwa tahap prabencana belum dilaksanakan secara optimal. Hal ini dapat dilihat dari penggunaan dan penekanan pada beberapa proposisi dalam teks berita yang menunjukkan ketidaksiapan atau belum maksimalnya upaya pencegahan, yaitu pada berita yang memuat kalimat seperti “total korban jiwa mencapai 1.112 orang”, “sekitar 498.447 jiwa mengungsi”, yang menunjukkan bahwa risiko bencana belum berhasil diminimalkan sejak tahap awal. Selain itu, terdapat proposisi berupa “158.088 rumah warga rusak” dan “1.600 fasilitas umum mengalami kerusakan berat”, yang mengindikasikan bahwa upaya mitigasi struktural seperti pembangunan bangunan tahan bencana belum berjalan optimal. Proposisi lain juga terlihat pada kalimat “pengungsi masih bertahan di posko dengan keterbatasan fasilitas seperti listrik, air bersih, dan pangan”, yang menunjukkan kurangnya kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi bencana sebelum terjadi. Selanjutnya, terdapat penekanan pada kondisi “akses wilayah terisolasi” dan “jembatan rusak”, yang menggambarkan lemahnya perencanaan risiko bencana pada wilayah rawan. Tidak hanya itu, dalam berita juga disebutkan “1.009 sekolah terdampak sehingga kegiatan belajar terganggu”, yang menunjukkan bahwa perlindungan terhadap sektor vital seperti pendidikan belum menjadi prioritas dalam tahap prabencana.

Rangkaian proposisi tersebut secara tematik membentuk makna bahwa bencana tidak hanya terjadi sebagai fenomena alam, tetapi juga dipengaruhi oleh belum optimalnya pelaksanaan tahap prabencana. Dengan demikian, framing yang dibangun dalam pemberitaan cenderung menegaskan bahwa besarnya dampak bencana merupakan indikator adanya kelemahan dalam upaya mitigasi dan kesiapsiagaan sebelum bencana terjadi.

Struktur tematik yang digunakan oleh tvOne tidak hanya memperlihatkan hubungan sebab-akibat dalam peristiwa bencana, tetapi juga memperkuat makna bahwa bencana tersebut merupakan refleksi dari belum optimalnya pelaksanaan kebijakan negara dalam penanggulangan bencana, terutama yang terlihat melalui penggunaan dan penekanan pada proposisi-proposisi yang menunjukkan ketidaksiapan atau belum maksimalnya upaya penanggulangan bencana. Tema yang dibangun melalui hubungan proposisi yang saling terhubung menunjukkan bahwa peristiwa bencana tidak dapat dilepaskan dari konteks yang lebih luas, yaitu efektivitas kebijakan pemerintah dalam mengelola risiko dan melindungi masyarakat secara menyeluruh.

Struktur retorik berita 1 sampai 5 menunjukkan bahwa tvOne dalam program Apa Kabar Indonesia Pagi membangun makna melalui pemilihan diksi yang kuat dan emosional, seperti “berjuang”, “minim”, “rusak”, “kendala”, dan “terdampak”, yang tidak hanya menggambarkan peristiwa, tetapi juga mempertegas kondisi krisis yang dialami masyarakat. Pemilihan bahasa ini menunjukkan bahwa media tidak sekadar menyampaikan informasi, tetapi juga membentuk persepsi khalayak terhadap realitas bencana.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 6 huruf a menyatakan: “Tanggung jawab pemerintah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi pengurangan risiko bencana dan pemaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan.” Ketentuan ini menunjukkan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab dalam mengurangi risiko bencana. Namun, penggunaan diksi seperti “rusak” dan “tidak layak” menunjukkan bahwa kerusakan infrastruktur masih terjadi secara luas. Selain itu, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 33 menyatakan: “Penyelenggaraan penanggulangan bencana terdiri atas tahap prabencana, tanggap darurat, dan pascabencana.” Ketentuan ini menunjukkan bahwa penanggulangan bencana harus dilakukan secara menyeluruh. Namun, penggunaan diksi dalam pemberitaan menunjukkan bahwa penanganan lebih banyak berfokus pada tahap tanggap darurat dan pemulihan, padahal UU telah mengatur upaya penanggulangan bencana mulai dari tahap pengurangan resiko sebelum bencana terjadi atau prabencana.

Struktur retorik yang digunakan oleh tvOne menunjukkan bahwa pemilihan kata dalam pemberitaan tidak hanya berfungsi sebagai alat penyampaian informasi, tetapi juga sebagai sarana untuk membangun makna sosial mengenai bencana. Hal ini terlihat dari penggunaan leksikon dalam analisis berita, seperti “meningkat” yang tampak dalam kalimat “jumlah kejadian bencana terus meningkat”, yang menunjukkan eskalasi peristiwa. Selain itu, leksikon “mempercepat” muncul dalam kalimat “pemerintah berupaya mempercepat penanganan bencana”, yang mengindikasikan bahwa tindakan dilakukan setelah dampak bencana terjadi, padahal (kembali lagi) UU telah mengatur upaya penanggulangan bencana mulai dari tahap pengurangan resiko sebelum bencana terjadi atau prabencana, bahkan pendanaannya pun telah diatur dan disiapkan.

Penggunaan leksikon dalam kalimat- kalimat tersebut memperlihatkan bahwa diksi dalam pemberitaan tidak hanya menggambarkan fakta, tetapi juga membangun makna bahwa bencana merupakan fenomena yang terus meningkat, berdampak luas, dan belum sepenuhnya diimbangi dengan upaya pemerintah dalam menanggulangnya secara optimal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## **KESIMPULAN**

Pembingkaiian atau *framing* yang dilakukan oleh tvOne melalui struktur sintaksis, skrip, tematik, dan retorik menunjukkan media menekankan bahwa pemerintah belum bertanggung jawab secara penuh dalam upaya penanggulangan bencana. Dampak bencana alam yang terjadi di wilayah Sumatera, urgensi penanggulangannya seharusnya dilakukan oleh pemerintah secara menyeluruh, namun kenyataannya sampai akhir Februari 2026 korban masih terus bertambah. Beberapa pemberitaan lebih menekankan pada aspek kejadian bencana, penanganan bencana, dan dampak sehingga *framing* yang terbentuk lebih berfokus pada bencana, respons penanganan, dan dampak dibandingkan analisis penyebab secara komprehensif

Penelitian ini menemukan bahwa *framing* yang dilakukan oleh tvOne dalam program Apa Kabar Indonesia Pagi cenderung menonjolkan tugas dan fungsi pemerintah yang belum sepenuhnya bertanggung jawab dalam upaya penanggulangan bencana, seperti belum sepenuhnya memberikan penekanan pada penanggulangan secara lanjut, aspek mitigasi, pencegahan bencana secara mendalam, dan pendanaan sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2021 tentang Dana Bersama Penanggulangan Bencana, dan Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pelaksanaan Penelaahan, Verifikasi, dan Evaluasi terhadap Penyaluran Dana Bersama Penanggulangan Bencana. Dengan demikian, media tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga membentuk konstruksi realitas yang memengaruhi pemahaman masyarakat terhadap penanggulangan bencana di Indonesia, khususnya di wilayah Sumatera

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif*. CV Jejak.
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia. (2026). *Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 tentang pelaksanaan penelaahan, verifikasi, dan evaluasi terhadap penyaluran dana bersama penanggulangan bencana*. <https://pasal.id/peraturan/perban/peraturan-bnpb-no-1-tahun-2026>

- Fadillah, A., & Azhar, A. A. (2026). Framing unggahan informasi bencana banjir dan longsor Sumatera di akun Instagram @kompas.com. *Journal Lembagakita*. <https://journal.lembagakita.com/jtik/article/view/6859/4307>
- Insani, D. F., & Zamzamy, A. (2023). Analisis framing pemberitaan media online CNBC Indonesia.com dan Kompas.com mengenai dampak lingkungan pemindahan ibu kota negara. *Innovative: Journal of Social Science*, 3(4), 2981–2993. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>
- Kompas TV. (2025). *Data bencana Indonesia 2025: 3.116 kejadian, banjir jadi penyumbang korban terbesar*. <https://www.kompas.tv/info-publik/639409/data-bencana-indonesia-2025-3-116-kejadian>
- Maulana, G. C., & Putri, T. W. (2024). Analisis framing model Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki terhadap berita kecelakaan PT Kereta Api Indonesia di Cicalengka Bandung pada media online BBC News Indonesia. *Jurnal Syntax Admiration*, 5(12), 5855–5866. <https://doi.org/10.46799/jsa.v5i12.1915>
- Marheinis, M. I., & Herpindo. (2021). Analisis framing pemberitaan media daring: Perbedaan pemberitaan Indosport dan Bolasport.com tentang kekalahan Timnas Indonesia. *Journal of Innovation Research and Knowledge*, 17(1), 52–61. <https://www.researchgate.net/publication/354681812>
- Paramita, N. P., Kartinawati, E., & Wiryawan, H. (2022). Analisis framing pemberitaan tidak berkibarnya bendera merah putih di upacara penutupan Thomas Cup 2020 (studi di CNNIndonesia.com dan PikiranRakyat.com). *Jurnal Asiatif*, 1(2), 78–86. <https://orcid.org/0000-0002-3937-0880>
- Pemerintah Republik Indonesia. (2007). *Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/29492/uu-no-24-tahun-2007>
- Pemerintah Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2021 tentang dana bersama penanggulangan bencana*. <https://peraturan.bpk.go.id>
- Pratama, M., & Saragih, Y. (2022). Analysis of the framing model of Zhongdang Pan and Gerald M. Kosicki in reporting on the moving of the national capital in online media Tempodot.co. *BIRCI-Journal*, 5(2), 17405–17413.
- Sucipta, J. A. W., & Kurniawan, R. C. (2021). Analisis framing pemberitaan media online Detik.com dan Kompas.com mengenai kebijakan Kaltim silent. *An-Nida: Jurnal Komunikasi Islam*, 13(1), 37–49. <https://doi.org/10.34001/an-nida.v13i1.2171>
- Sugiyono. (2014). *Metode penelitian bisnis*. Alfabeta.